

SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN (PNPMP) MANDIRI DIDESA PELAWI SELATAN
KECAMATAN BABALAN KABUPATEN LANGKAT

OLEH:

KIKI LARASANDI NASUTION

NPM 1403100197P

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

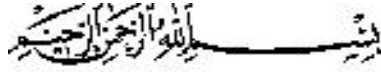
Konsentrasi Pembangunan



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN 2017

PERNYATAAN



Dengan ini saya, Kiki Larasandi NST. NPM 1403100197P , menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk ang dilarang oleh undang-undang termasuk karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya ilmiah orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri bukan karya orang lain atau plagiat serta jiplakan orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi in tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi da sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa pengajuan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini berseta nilai-nilai hasil ujia skripsi saya di batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan,

Yang menyatakan

KIKI LARASANDI NST

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN (PNPM) MANDIRI DI DESA PELAWI SELATAN KECAMATAN BABALAN KABUPATEN LANGKAT

KIKI LARASANDI NST

Npm: 1403100197P

Sesuai dengan visi pembangunan di Indonesia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, diperlukan adanya pembangunan yang partisipatif yang dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. PNPM Mandiri pedesaan merupakan program pembangunan yang dipilih sebagai alternatif untuk menanggulangi kemiskinan melalui proses pemberdayaan. Dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat agar masyarakat melibatkan dirinya secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan karena dengan adanya partisipasi masyarakat maka masyarakat bukan hanya dijadikan sebagai objek melainkan subjek dari pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara luas melalui pemberdayaan maka kebutuhan masyarakat akan terjawab.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pelawi Selatan karena desa ini memiliki jumlah kelompok SPP yang cukup banyak dan jumlah alokasi dana SPP yang cukup besar. Masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana keberhasilan pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Pelawi Selatan dalam mencapai tujuannya dengan waktu yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan dengan lebih mendalam. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, yaitu dengan 2 orang informan kunci,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan SPP di Desa Pelawi Selatan telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran. Kegiatan SPP di Desa Pelawi Selatan telah berhasil mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha dan memberikan kesempatan kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha. Kegiatan SPP di Desa Pelawi Selatan dinilai telah efektif karena telah berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan-tujuannya sesuai dengan waktu yang ditentukan serta memberikan manfaat bagi masyarakat terutama anggotanya dan telah memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada umat manusia, salah satunya adalah keberhasilan dan kesuksesan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini di tulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumantera Utara Medan. Sebagai bentuk aplikasi teori yang selama ini di dapatkan melalui proses perkuliahan yang di laksanakan.

Skripsi ini berjudul : **“PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN (PNPMP) MANDIRI DI DESA PELAWI SELATAN KECAMATAN BABALAN KABUPATEN LANGKAT”**

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, kepada yang terhormat :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda Sunardi NST dan ibunda tercinta Mala Ratina, yang senantiasa membimbing dan memberikan dukungan baik moril, dorongan, motivasi dan do'a restu maupun materi kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dan selaku pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Zulfahmi ibnu M.I.KOM. Selaku wakil dekan I Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus yang sudah memberikan sebagian waktu, pikiran dan tenaganya untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak AFFAN Al-Quddus S.Sos. selaku pembimbing II yang dengan penuh kearifan membimbing serta mengarahkan penulisan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan seluruh staff pegawai biro yang penulis hormati dan tidak bisa penulis uraikan satu persatu. Terima kasih banyak karena telah membagikan ilmunya dan juga telah memberikan bimbingan studi serta pelayanan yang sebaik-baiknya, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak kepala Desa Pelawi Selatan beserta jajarannya yg telah mengizinkan penulis untuk penelitian di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas.
10. Kepada adik-adik saya M.Andre Lasuandi NST,Dea Mutia putri NST, Echa Manda Putri NST,Cika Kharisa putri NST yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada My Best Jurriyati Khaira, Kiki Larasandi, Ervi Marlina, Faisal Anas, Eni Aulia yang telah memberikan pelajaran berharga kepada penulis apa itu artinya perjuangan, proses, hasil dan telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang tidak bisa penulis sebutkan serta uraikan namanya satu persatu secara detail, penulis mengucapkan banyak terima kasih telah membantu penulis dalam poses penulisan skiripsi ini.

Seiring do'a dan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dan kepada penulis semoga diberikan kekuatan berfikir serta wawasan yang semakin luas yang telah menyelesaikan tugasnya baik perkuliahan maupun skripsi.

Penulis menyadari apa yang terkandung dalam skripsi ini, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknis, redaksi maupun materinya. Seiring dengan hal itu saran dan nasehat yang bersifat membangun masih sangat penulis harapkan.

Medan, Maret 2017

Penulis

KIKI LARASANDI NASUTION

DAFTAR ISI

	halaman
Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar gambar dan table	v
Daftar isi	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah	1
A. Rumusan Masalah	8
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
C. Sistematika Penulisan	9
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Partisipasi Masyarakat	10
1. Pengertian partisipasi masyarakat	10
2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat	12
3. Tahapan dan cirri partisipasi masyarakat	13
4. Strategi untuk menggerakkan partisipasi	15
5. Tingkat partisipasi	16
6. Faktor yang mempengaruhi partisipasi	17
B. Pemberdayaan Masyarakat	19
1. Pengertian pemberdayaan masyarakat	19
2. Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat	22
3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat	22
C. Program Nasional Pemberdayaan Nasional Mandiri Pedesaan	24
1. Visi dan Misi PNPM Mandiri Pedesaan	25
2. Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan	26

3. Prinsip dasar PNPM Mandiri Pedesaan.....	26
4. Komponen PNPM Mandiri Pedesaan.....	28
5. Ruang Lingkup Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.....	28
D. Konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	29
E. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).....	31
1. Tujuan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).....	31
2. Prinsip Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).....	32
3. Pendanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).....	33
4. Syarat kelompok Penerimaan Manfaat	33
5. Tahapan Pengajuan Proposal.....	34
6. Peraturan Pinjaman	35
7. Sanksi dan Denda	36

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Definisi konsep	37
C. Kategorisasi	38
D. Kerangka konsep.....	38
E. Teknik pengumpulan Narasumber	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisa Data	40
H. Gambaran Lokasi Penelitian	41
I. Stuktur Organisasi	49

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

1. Penyajian Data	52
2. Analisis data	55

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	65
2. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan sarana dan prasarana desa, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk mendorong masyarakat agar mampu untuk mengkaji masalah/kebutuhannya sendiri, memikirkan jalan keluar untuk memperbaiki keadaannya serta mengembangkan potensi-potensi dan keterampilan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*), yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi dengan tujuan membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam proses- proses dan kegiatan masyarakat serta untuk menciptakan kembali masa depan masyarakat dan individu.

PNPM Mandiri resmi diluncurkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Palu, Sulawesi Tengah pada 30 April 2007 yang dilaksanakan hingga tahun 2015 dan sejalan dengan target pencapaian MDGs (*Millennium Development Goals*). Adapun yang menjadi dasar kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (*TKPK*) yang diketuai oleh Menkokesra yang bertugas untuk menemukan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (*PMD*), Departemen atau Kementrian Dalam Negeri.

Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (*PISEW*) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. Program *PISEW* dengan intervensi berupa bantuan teknis dan investasi infrastruktur dasar perdesaan. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. PNPM Mandiri di desa diintegrasikan untuk membangun fasilitas dan sarana masyarakat di perdesaan melalui kegiatan fisik dan juga kegiatan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yaitu melalui simpan pinjam perempuan. Pelaksanaan PNPM Mandiri akan diprioritaskan pada desadesa tertinggal yaitu dengan memunculkan PNPM Mandiri Pedesaan.

Dengan demikian partisipasi merupakan suatu bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Semakin banyak orang yang menjadi

peserta aktif dan semakin lengkap partisipasinya maka semakin ideal proses yang akan diwujudkan. Maka dalam setiap program yang bertujuan menciptakan kehidupan yang layak bagi masyarakat harus melibatkan masyarakat itu sendiri dalam setiap tahapan dan proses dalam kegiatan tersebut. Karena peran masyarakat sangat penting dimana masyarakatlah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka sehingga suatu pembangunan berhasil dilaksanakan .

Oleh sebab itu, upaya pemerintah mengurangi kemiskinan terus menerus dilakukan, dan kini yang sedang dikembangkan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk masyarakat miskin perkotaan dan juga pedesaan yang telah dilaksanakan hampir pada seluruh wilayah Indonesia yaitu Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembalimekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, yang ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Menurut program ini, akar permasalahan kemiskinan terletak pada manusia itu sendiri sehingga upaya penanggulangannya pun harus menitikberatkan pada pemberdayaan manusia itu sendiri, yaitu mendorong manusia agar dapat

menemukan kembali jati dirinya sebagai pengelola alam semesta. Dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, presiden mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena program itu langsung dari usulan masyarakat, sehingga lebih tepat, lebih baik, dan tidak ada kebocoran. Dengan melibatkan dan memikirkan tentang masalah kemiskinan, diharapkan masyarakat sendiri secara tepat akan membantu mengatasi masalah kemiskinan serta lebih mandiri dan mempunyai kekuatan (*power*) dalam memberdayakan kehidupan mereka.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia. PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah

untuk membangun sarana dan prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Program PNPM Mandiri Perdesaan bukan hanya berkisar pada individu yang miskin tapi juga menganggarkan untuk infrastruktur seperti jalan desa dan program fisik lainnya agar akses masyarakat bisa lebih mudah dan dapat terjangkau dengan baik. Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan secara garis besar terbagi dalam lima jenis kegiatan, yaitu kegiatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) dan kegiatan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Salah satu jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah kegiatan peningkatan kapasitas dan ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal dan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang sering disebut Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP).

Proses pembangunan akan berjalan optimal jika berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kesetaraan gender. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan milenium (MDGS) di Indonesia yakni mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Permasalahan gender sebenarnya bertumpu pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan peran dan beban antara laki-laki dengan perempuan, dimana peranan perempuan agak dikesampingkan sehingga mereka tidak dapat menyalurkan potensi yang mereka miliki terutama untuk peningkatan taraf hidup mereka sehingga menghambat

proses pembangunan yang berakhir pada kemiskinan. Selama ini yang terjadi adalah kondisi sosial yang sangat menonjolkan peran laki-laki. Laki-laki dianggap kaum yang derajatnya lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga laki-laki memiliki hak yang lebih besar baik dalam mengatur rumah tangga, memperoleh pendidikan, mengeluarkan pendapat, maupun dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya menyebabkan perempuan menjadi kaum marginal yang selalu terpinggir dan tergusur.

Menurut Yunus, perempuan miskin terbukti lebih cepat menyesuaikan diri dan jauh lebih baik dalam proses membangun kemandirian ketimbang laki-laki. Perempuan miskin memandang jauh ke depan dan bekerja keras untuk membebaskan diri dan keluarganya dari kemiskinan. Ketika mendapat penghasilan, prioritas pertama perempuan adalah menyiapkan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak dan rumah tangganya. Sebaliknya, laki-laki cenderung memprioritaskan segala sesuatu untuk dirinya. Jadi salah satu cara untuk mencapai pembangunan yang baik dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan memberdayakan perempuan dan adanya kesetaraan peranan dan beban antara laki-laki dengan perempuan dalam segala aspek kehidupan..

SPP merupakan pinjaman modal usaha tanpa agunan dalam bentuk perguliran dengan kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman melalui pembentukan kelompok perempuan. SPP memberikan fasilitas kredit yang mudah untuk perkembangan UMKM dengan memfokuskan pada pemberdayaan perempuan. SPP memperoleh alokasi dana maksimal 25% dari total dana BLM kecamatan yang merupakan dana kedua terbesar setelah kegiatan infrastruktur.

Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa, namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok. Selain itu dana atau modal usaha yang diperuntukan dan dapat di akses oleh kelompok SPP adalah dana bergulir yaitudana pinjaman yang telah dikelola dari dana BLM sebelumnya.

SPP sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan pinjaman dana dengan jasa pengembalian (bunga) dan proses pencairan yang mudah. Caranya cukup dengan membentuk kelompok yang terdiri dari kaum perempuan yang memiliki rencana untuk pengembangan usaha serta menunjukan identitas yang bersangkutan berupa KTP atau surat keterangan domisili dan mengisi formulir yang sudah disiapkan dalam bentuk proposal pinjaman. Setelah dilakukan verifikasi oleh tim yang ditentukan dan ditetapkan melalui forum Musyawah Antar Kecamatan (MAD), maka dana tersebut sudah bisa dicairkan. Satu kelompok minimal terdiri dari sepuluh orang anggota yang mana nantinya pinjaman tersebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota. Pengembalian pinjaman tersebut dilakukan setiap bulan selama satu tahun ditambah dengan bunga pinjaman menurun. Keharusan individu berkelompok dengan individu yang lainnya dalam melakukan kegiatan SPP menyebabkan terciptanya mekanisme kontrol antara anggota satu dengan anggota lainnya dalam sebuah kelompok.

Kegiatan SPP memiliki tujuan mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan PNPMM Mandiri dinilai efektif

apabila tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan manfaat dan hasil yang baik bagi masyarakat khususnya pada kehidupan anggota kelompok SPP itu sendiri. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pentingnya mengetahui partisipasi masyarakat lebih berfokus kepada *Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pedesaan di Desa Pelawi Selatan*.

Oleh karena itu penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPMP) mandiri di Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPMP) Mandiri di Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat (Studi kasus : Simpan Pinjam Kelompok Perempuan).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPMP mandiri dibidang fisik diDesa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.

2. Mengetahui pelaksanaan pinjaman bergulir PNPM
3. Mengetahui sasaran dana peminjam bergulir program PNPM.

Manfaat Penelitian:

- a. Manfaat secara ilmiah, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak– pihak yang terkait dalam pengimplementasian Program Nasional Pemberayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri – Perkotaan.
- c. Manfaat secara akademis, diharapkan mampu menambah khasanah dan literatur atau kepastakaan baru dalam penelitian sosial.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Uraian Teoritis

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang akan menguraikan antara lain partisipasi masyarakat, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, tahapan dan cirri partisipasi

masyarakat, strategi untuk menggerakkan partisipasi, tingkatan partisipasi, factor yang mempengaruhi partisipasi, pemberdayaan masyarakat, pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, indikator pemberdayaan masyarakat, program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pedesaan (PNPMP) mandiri, visi dan misi PNPMP mandiri, tujuan PNPMP mandiri, pedanaan, konsep pembangunan alternative, hubungan Partisipasi Masyarakat.

BAB III : Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian ,Narasumber, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Teknik pengumpulan data, Teknik Analisa Gambaran ,Lokasi Penelitian.

BAB IV : Analisis data dan Hasil Penelitian

Bab ini memuat tentang penyajian data, analisis data

BAB V : Penutup

Pada bab ini gkan tentang kesimpulan dari hasil dari penelitian dan saran-saran yang di teliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A.Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan, pelayanan pemerintah. Sehingga partisipasi itu memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan, dimana pembangunan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Dalam pembangunan, partisipasi semua unsur masyarakat dengan kerja sama sukarela merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan.

Menurut Adisasmita (2004:38) partisipasi masyarakat dapat di definisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Mubyarto dalam Ndraha (1990:102) menyebutkan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Davis dalam Tangkilisan memberikan pengertian partisipasi sebagai berikut: “ *Participation is defined as an individual as mental and emosional involment in a group situation*

that encourages him to contribute to group goal and share responsibility for them.” Bila diterapkan dalam pembangunan, maka pendapat Davis (2005:321) ini mengandung tiga unsur pokok, yaitu :

1. Adanya keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan aktifitas kelompok,
2. Adanya motivasi individu untuk menggerakkan yang dapat memberikan kontribusi bergerak yang dapat berwujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga dan keterampilan,
3. Timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.

Wahyudi Kumorotomo (2013:135-138) mengatakan bahwa partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warganya. Secara umum corak partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam:

1. Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation)
2. Partisipasi kelompok (group participation)
3. Kontak antara warga Negara dengan pemerintah (citizen government contacting)
4. Partisipasi warga negara langsung

Partisipasi ditempatkan sebagai *style of development* yang berarti bahwa partisipasi dalam kaitannya dengan proses pembangunan dan bukan sebagai suatu bagian dari usaha system maintenance. Untuk itu partisipasi seharusnya diartikan sebagai suatu nilai kerja bagi masyarakat maupun pengelola pembangunan

sehingga partisipasi berfungsi sebagai mesin pendorong berjalannya suatu pembangunan.

Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam penyusunan perencanaan, dan implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebut pun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental ke arah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

2. Bentuk- bentuk Partisipasi Masyarakat

Secara umum partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, dan keterampilan. Sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi social, pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Menurut Ndraha (1987:103) bentuk atau partisipasi menjadi 4 bentuk yaitu sebagai berikut :

- a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai salah satu titik awal perubahan social
- b. Partisipasi dalam memperhatikan, menyerap, dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya).
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan oprasional pembangunan

Adapun jenis- jenis partisipasi masyarakat lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pikiran (Physhological participation)
2. Tenaga (Physical participation)
3. Pikiran dan tenaga (Pyschological and Physical participation)
4. (Participation with skill)
5. Barang (Material)
6. Uang (Money participation)

Menurut Ericson (1994: 89) bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk yang terbagi dalam 3 tahap, yaitu:

- a. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan

anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;

- b. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.
- c. Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

3.Tahapan dan Ciri Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting ketika diletakkan di atas keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling penting tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Kaho (2007:127) di dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibagi dalam empat tahapan yaitu:

1. Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan.

Dalam tahap ini partisipasi masyarakat sangat mendasar sekali, terutama karena putusan politik yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut andil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tindakan selanjutnya dari tahap pertama, partisipasi dalam pembangunan akan terlihat ketika masyarakat ikutserta dalam memberi kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

3. Partisipasi dalam Memamfaatkan Hasil Pembangunan

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka dalam tahap ini masyarakat secara bersama akan menikmati hasil pembangunan dengan adil tanpa ada pengecualian. Setiap masyarakat akan mendapatkan bagian sebesar kontribusi atau pengorbanan yang diberikan. Manfaat yang dapat diterima dalam pembangunan ini yaitu manfaat materialnya; mamfaat sosialnya; dan manfaat pribadi.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

Suatu kegiatan dapat dinilai apabila memberi mamfaat yang sepantasnya bagi masyarakat. Maka dalam tahap ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai sendiri hasil yang sudah didapat dalam pembangunan, dan masyarakat menjadi hakim yang adil dan jujur dalam menilai hasil yang ada.

Dalam modul dasar PNPB Mandiri dijelaskan bahwa dijelaskan bahwa yang menjadi ciri- ciri partisipasi masyarakat yaitu :

- a. Bersifat proaktif dan bukan reaktif artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak.
- b. Ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat
- c. Ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut
- d. Ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

4. Strategi Untuk Menggerakkan Partisipasi

Usaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan menggerakkan partisipasi. Program pembangunan selama ini hanya melibatkan pemerintah saja sehingga hasilnya kurang mengenai pada kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting karena melalui masyarakatlah yang mengetahui apa yang mereka butuhkan, sehingga dengan adanya partisipasi maka kebutuhan yang diharapkan akan terpenuhi.

Agar suatu program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, harus ada jaminan bahwa partisipasi masyarakat terlibat didalamnya. Maka untuk menjamin hal itu terjadi harus ada terciptanya :

1. Politik Will dari pemerintah daerah untuk membuka ruang dan arena bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Karena selama ini atau selama orde lama

dikondisikan dengan menerima apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, dan tidak dibiasakan untuk melakukan program secara partisipatif.

2. Adanya jaminan atau garansi bagi orang yang berpartisipasi. Bahwa partisipasi merupakan syarat dari setiap program pembangunan, otomatis harus melibatkan stakeholders.
3. Masyarakat sebagai stakeholder harus belajar juga untuk berpartisipasi, apabila ruang dan arena sudah disediakan dan jaminan sudah diberikan maka masyarakat tidak akan takut lagi untuk mengeluarkan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Agar perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, usaha itu:

1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata
2. Dijadikan stimulus terhadap masyarakat yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban yang dikehendaki
3. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki secara berlanjut.

5. Tingkatan Partisipasi

Menurut Pretty, J (2011:223) ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal, yaitu sebagai berikut :

1. Partisipatif dan Manipulatif, ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitaan apa

yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program.

2. Partisipasi Informatif, disini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat.
3. Partisipasi komunikatif, masyarakat berpartisipasi dengan dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk mengajukan pandangan masyarakat sebagai masukan untuk ditindaklanjuti.
4. Partisipasi intensif, masyarakat memberikan pengorbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan intensif, berupa upah, walau tidak di libatkan dalam proses pembelajaran dan eksperimen-eksperimen.yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setela insentif dihentikan.
5. Partisipasi fungsional, masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat bergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.
6. Partisipasi interaktif, masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang berstruktur dan sistematis. Masyarakat

memiliki peran mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

7. Partisipasi mandiri (self mobilization), masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk mengubah system atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumber data yang diperlukan, yang terpenting masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan atau digunakan.

6. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

b. Faktor internal

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

Menurut Plumer dalam Suryawan (2012) beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
2. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
3. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

4. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada

Dalam kondisi tertentu barangkali hal tersebut memang disebabkan karena masyarakat belum siap atau belum termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Walaupun demikian, juga tidak tertutup kemungkinan persoalannya tidak terletak pada rendahnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai

pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Menurut Adisasmita (2004: 38) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara efektif dan efisien, baik dari aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, dan teknologi) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan), dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi). Sedangkan Menurut Suharto pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka mempunyai kekuatan atau kemampuan dalam:

- a. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-baran dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan
- b. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan local dan regional yang bersifat bottom-up
- b. Manajemen local
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan
- d. Pembentukan kelembagaan formal dan informal untuk mengontrol perencanaan.

Di dalam melakukan pemberdayaan, keterlibatan pihak yang diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang mengikutsertakan masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan (empowering) pihak yang diberdayakan dengan pengalaman merancang, melaksanakan, dan memepertanggungjawabkan upaya peningkatan diri ekonomi. Salah satu bentuk dari aktualisasi pemberdayaan masyarakat tercermin dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan menikmati hasil. Dengan pemberdayaan diharapkan akan dapat meningkatkan akses kelompok miskin dalam proses pengambilan keputusan, akses terhadap fasilitas dan pelayanan, akses terhadap bantuan hukum, meningkatkan posisi tawar, serta mengurangi peluang terjadinya eksploitasi oleh kelompok lain.

Menurut Kartasmita (1996:192) upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong,

memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang penting dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber- sumber kemajuan teknologi, informasi, pasar, modal dan lapangan pekerjaan.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Dengan demikian tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Tujuan utama pemberdayaan itu sendiri adalah memperkuat kekuasaan masyarakat miskin dan kelompok lemah lainnya. Salah satu bentuk dari aktualisasi pemberdayaan masyarakat tercermin dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan menikmati hasil. Dengan pemberdayaan diharapkan akan dapat meningkatkan akses kelompok miskin dalam proses

pengambilan keputusan, akses terhadap fasilitas dan pelayanan, akses terhadap bantuan hukum, meningkatkan posisi tawar, serta mengurangi peluang terjadinya eksploitasi oleh kelompok lain.

2. Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

1. upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
2. program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka.

3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Keiffer dalam Suharto (2009: 63) , pemberayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan

kompetensi partisipatif. Parsons dalam Suharto, mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada :

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individu yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan social yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan social yng dimulai dari pendidikan dan politisasi orang- orang lemah dan kemudian melibatkan upaya- upaya kolektif dari orang – orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur- struktur yang masih menekan.

Sculer, Husaini (2009:66) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (power within), kekuasaan untuk (power to), kekuasaan atas (power over) dan kekuasaan dengan (power with), yakni sebagai berikut:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempet tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu), kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, shampo).
3. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika dia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika dia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika dia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga misalnya, mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditanam, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di luar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintahan desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama

presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seorang dianggap berdaya jika dia terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintahan.

C. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini dikembangkan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998 yang selama ini dinilai berhasil (Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, 2012).

Program pendukung PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari:

1. PNPM Generasi
2. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan
3. PNPM Mandiri RESPEK (Papua)
4. PNPM Mandiri BKPG (Aceh)
5. PNPM Integrasi/P2SPP
6. PNPM Mandiri Respek Pertanian
7. PNPM Mandiri Pasca Bencana
8. PNPM Mandiri Pasca Krisis

1. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan
- b. Pelembagaan system pembangunan partisipatif
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.

2. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan

Di dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri (2012) dijelaskan bahwa PNPM Mandiri memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berdasarkan pedoman tersebut, dapat ditarik bahwa tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khususnya meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.

3. Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan

Sesuai dengan Pedoman Umum PNPM Mandiri (2012), PNPM Mandiri mempunyai prinsip yang selalu menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri. Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari

Prinsip-Prinsip PPK ditambah dengan beberapa prinsip lain yang merupakan penekanan terhadap prinsip-prinsip yang telah ada dan dilakukan sebelumnya dalam PPK atau PNPM PPK. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Bertumpu pada Pembangunan Manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
2. Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
3. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
4. Berorientasi pada Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
5. Partisipasi/Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotongroyong menjalankan pembangunan.
6. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
7. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

8. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

4. Komponen PNPM Mandiri Perdesaan

Di dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri (2012) disebutkan bahwa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan terdapat komponen-komponen kegiatan yang merupakan unsur utama yang harus ada di dalam setiap program PNPM Mandiri Perdesaan. Komponen-komponen tersebut adalah :

1. Pengembangan Masyarakat. Serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil.
2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Berbentuk dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal Serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau pemangku kepentingan lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menjalani kehidupannya secara layak. Kegiatan terkait dalam

komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

5. Ruang Lingkup Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri (2012), pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:

1. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya.
2. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini.
3. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

D. Konsep Pembangunan Alternatif

Model pembangunan alternative menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat berparadigma bottom-up dan lokalitas. Munculnya

pembangunan alternative didasari oleh motivasi untuk mengembangkan dan mendorong struktur masyarakat menjadi berdaya dan menentang penindasan melalui pembuatan regulasi dalam prinsip keadilan. Pembangunan alternative atau Alternative development merupakan suatu pembangunan yang terutama bertujuan untuk membangun dan mendukung struktur-struktur tingkat masyarakat yang meningkatkan pemberdayaan dan menentang struktur-struktur yang menindas dari tatanan yang ada. Pendekatan yang digunakan model pembangunan alternative ini adalah pembangunan yang menyatu dengan budaya local dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sebagai bentuk pembangunan alternative, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis komunitas adalah strategi yang didasari cita-cita untuk mengembangkan dan merekonstruksi struktur masyarakat kecil. Community Development adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi social ekonomi dan kultur masyarakat, mengintegrasikan masyarakat ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi masyarakat yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.

Menurut Christenson dan Robinson dalam Soetomo (2006:81) Pembangunan masyarakat (Community Development) merupakan suatu proses dimana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan social (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, social, cultural, dan atau lingkungan mereka. Dalam pembangunan masyarakat intervensi bukanlah merupakan hal yang mutlak, justru

yang lebih penting adalah prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses yang berlangsung.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik prinsip umum pembangunan masyarakat (Community Development) yang merupakan pendekatan dari pembangunan alternatif yaitu :

1. Fokus perhatian ditujukan pada masyarakat sebagai suatu kebulatan
2. Berorientasi pada kebutuhan dan permasalahan masyarakat
3. Mengutamakan prakarsa, partisipasi dan swadaya masyarakat.

Zubaedi (2013: 146) menyebutkan beberapa hal dalam pembangunan alternative yaitu sebagai berikut :

- a. Masyarakat dibangun bukan karena mereka bodoh dan tidak mampu, akan tetapi kemampuan yang tersedia perlu dioptimalkan agar mereka berkembang sesuai pengetahuan
- b. Pengetahuan local dan teknologi tepat guna sebagai basis pengembangan mereka
- c. Lebih menekankan pada aspek lokalitas.
- d. Perencanaan dilakukan secara otonomi berdasarkan potensi lokalitas dengan menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan.

Menurut Friedman dalam Zubaedi (2013:140) menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan alternative mengedepankan beberapa keyakinan.

1. Negara merupakan bagian dari problem pembangunan sehingga pembangunan alternative harus mengeluarkan dan bahkan melawan negara.
2. Rakyat tidak dapat berbuat salah dan bahwa masyarakat merupakan perkumpulan yang mandiri.
3. Tindakan masyarakat telah mampu dan mencukupi untuk merealisasikan pembangunan alternative tanpa campur tangan negara.

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan alternatif ini merupakan suatu model pembangunan bercirikan partisipatoris dan menekankan pemenuhan kebutuhan pokok dan bahkan hak asasi manusia dalam setiap langkah – langkah dalam program pembangunan. Untuk itu PNPM Mandiri Perdesaan merupakan suatu program pembangunan alternatif yang menekankan partisipasi luas, aksesibilitas, keterwakilan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan yang dapat mempengaruhi nasib masyarakat.

E. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

1. Tujuan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Di dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan (2011) dijelaskan bahwa kegiatan SPP memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun kedua tujuan tersebut adalah:

1. Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro,

pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

2. Tujuan Khusus

- a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha.
- b. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
- c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

2. Prinsip Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Prinsip Simpan Pinjam kelompok Perempuan merupakan acuan dalam setiap pola tindakan dan kebijakan bagi pelaksanaan kegiatan SPP. Adapun yang menjadi prinsip SPP adalah (Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, 2011) :

1. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
2. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpan dan pengelolaan pinjam.
3. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.

4. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
5. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

3. Pendanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Di dalam pelaksanaan kegiatan SPP, terdapat dua sumber pendanaan yang diterima oleh SPP. Pendanaan tersebut antara lain (Standar Operasional Prosedur Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri, 2012) :

1. Bantuan Langsung Mandiri (BLM). SPP memperoleh alokasi dana maksimal 25% dari total dana BLM Kecamatan.
2. Dana bergulir Merupakan dana yang berasal dari dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dikembalikan ke UPK sebagai pengelola dan digulirkan kembali kemasyarakat. Dana perguliran SPP hanya dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.

4. Syarat Kelompok Penerima Manfaat

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok perempuan yang ingin menerima manfaat dana pinjaman dari SPP. Di dalam Standar Operasional Prosedur Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri (2012) dijelaskan bahwa syarat-syarat kelompok tersebut adalah:

1. Kelompok beranggotakan seluruhnya perempuan.
2. Kelompok sudah berumur 1 tahun dan memiliki pengalaman mengelola simpan pinjam minimal 1 tahun dan berpotensi untuk berkembang.
3. Kelompok telah memiliki kepengurusan yang jelas (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota)
4. Kelompok telah melaksanakan pertemuan rutin minimal sekali dalam satu bulan.
5. Kelompok telah memiliki aturan kelompok secara tertulis (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)
6. Kelompok beranggotakan minimal 7 orang penerima manfaat dan maksimal 20 orang
7. Kelompok tidak memiliki anggota yang tumpang tindih dengan anggota kelompok lain.
8. Kelompok tidak beranggotakan hanya keluarga dekat seperti nenek, ibu, putri, menantu, dll.

5. Tahapan Pengajuan Proposal

Untuk mengajukan proposal pinjaman, kelompok perempuan harus melalui tahapan-tahapan yang telah diterapkan dalam mekanisme pelaksanaan SPP dengan ketentuan sebagai berikut (Standar Operasional Prosedur Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri, 2012) :

1. Kelompok calon penerima manfaat mengajukan proposal pinjaman ke UPK yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa, dengan melampirkan:
 - a) Surat permohonan kredit.
 - b) Daftar pengurus dan anggota kelompok
 - c) Rekapitulasi data peminjam dan besar pinjaman yang diajukan
 - d) Rencana angsuran kelompok
 - e) Aturan-aturan kelompok atau AD/ART
 - f) Surat pernyataan kesediaan anggota kelompok tanggung renteng
 - g) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang masih berlaku.
 - h) Foto copy Rekening tabungan kelompok jika ada.
2. Setelah proposal tersedia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka usulan kelompok diverifikasi oleh Tim Verifikasi sesuai tahapan verifikasi (Mengacu pada SOP Tim Verifikasi).
3. Setelah proses Verifikasi selesai maka BKAD menggelar MAD Perguliran yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, unsur lembaga desa, BKAD, BP-UPK, TV dan unsur kelompok pengusul.
4. Kelompok yang lolos verifikasi berhak mengikuti MAD untuk dibuat perangkungan dikaitkan dengan daftar tunggu kelompok
5. Kelompok yang tidak lolos verifikasi, mendapatkan pembinaan dan penguatan untuk kemudian mengambil kesempatan ikut MAD berikutnya.

6. Dalam MAD itu, kelompok lama yang baik (tidak menunggak), mendapatkan prioritas dibandingkan kelompok baru, dan juga dirangkingkan diantara mereka
7. BKAD mengajukan ke Camat untuk menerbitkan Surat Penetapan Camat.

6. Peraturan Pinjaman

Pada dasarnya besar pinjaman kelompok disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis usaha yang dilakukan oleh kelompok atau anggota serta kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Akan tetapi agar tidak lari dari sifat dan prinsip pengelolaan perguliran dana SPP ditentukan aturan sebagai berikut (Standar Operasional Prosedur Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri, 2012) :

1. Besar pinjaman kelompok baru ditetapkan maksimal Rp. 30.000.000,-
2. Besar pinjaman kedua dapat dilakukan sesudah pinjaman pertama telah lunas, besar pinjaman kedua disesuaikan dengan kebutuhan kelompok.
3. Besaran pinjaman anggota juga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggota untuk melunasi pinjaman, akan tetapi agar tidak lari dari sifat dan prinsip pengelolaan perguliran dana maka ditetapkan pinjaman anggota kelompok maksimal Rp 10.000.000,-
4. Jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan
5. Jasa pinjaman ditetapkan sebesar 1,5 % per bulan bunga menurun.

Angsuran pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok penerima manfaat dengan salah satu pola berikut :

- a. Angsuran Pokok dan Bunga setiap bulan
- b. Angsuran Pokok per dua bulan dan Bunga per bulan
- c. Angsuran Pokok per tiga bulan dan Bunga per bulan
- d. Angsuran Pokok per empat bulan dan Bunga per bulan
- e. Angsuran Pokok per enam bulan dan Bunga per bulan

Pengembalian atau penyetoran pinjaman (Pokok + Bunga) ke UPK dilakukan secara kolektif. Pengembalian pinjaman dibayarkan peminfaat kepada pengurus kelompok (atau yang ditunjuk) untuk disetorkan kepada UPK melalui bendahara UPK. Jangka waktu pengembalian pinjaman adalah maksimal 12 bulan atau kurang sejak tanggal penerimaan dana.

7.Sanksi dan Denda

Di dalam Standar Operasional Prosedur Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri (2012) dijelaskan beberapa sanksi dan denda bagi kelompok maupun anggota kelompok yang tidak mematuhi peraturan yang telah diatur di dalam SPP. Adapun sanksi dan denda tersebut adalah:

1. Bagi kelompok anggota yang pengembaliannya kurang dari 100 % maka kelompok atau anggota tersebut tidak berhak untuk mendapatkan perguliran berikutnya.
2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian pinjaman sebagaimana pasal 12 diatas, maka akan dikenakan denda sebesar 0,5 % perbulan dari pokok pinjaman.

3. Bagi kelompok atau anggota yang menungak lebih dari 6 kali angsuran maka kelompok atau anggota tersebut harus memberikan jaminan fisik yang nilainya sesuai dengan nilai tunggakan pinjaman, yang disertai dengan surat pernyataan penyerahan jaminan

BAB III

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Bentuk yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nawawi (2002) metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta yang telah diselidiki sebagai mana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat.

Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenaran berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

B. Defenisi Konsep

Konsep merupakan istilah atau defenisi yang dipergunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1995). Konsep menegaskan dan menetapkan apa yang akan diobservasi, dan juga memungkinkan peneliti untuk mengomunikasikan hasil-hasil penelitian (Suyanto, 2008). Agar memperoleh pembatasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti, maka penulis mengemukakan defenisi konsep sebagai berikut :

1. partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dengan memberikan kontribusi dalam pembangunan berupa barang, pikiran dan tenaga serta mempunyai tanggung jawab guna mencapai tujuan.
2. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.
3. Pembangunan alternative merupakan salah satu pembangunan yang terutama bertujuan untuk membangun dan mendukung struktur-stuktur tingkat masyarakat yang meningkatkan pemberdayaan dan menantang struktur yang menindas dari tatanan yang ada.
4. PNPM Mandiri Perdesaan adalah kebijakan atau program yang dikeluarkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang dikhususkan kepada masyarakat perdesaan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
5. Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian modal usaha berupa simpan pinjam untuk kelompok perempuan dengan tujuan untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha dan memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangganya melalui pendanaan modal usaha.

C. Kategorisasi

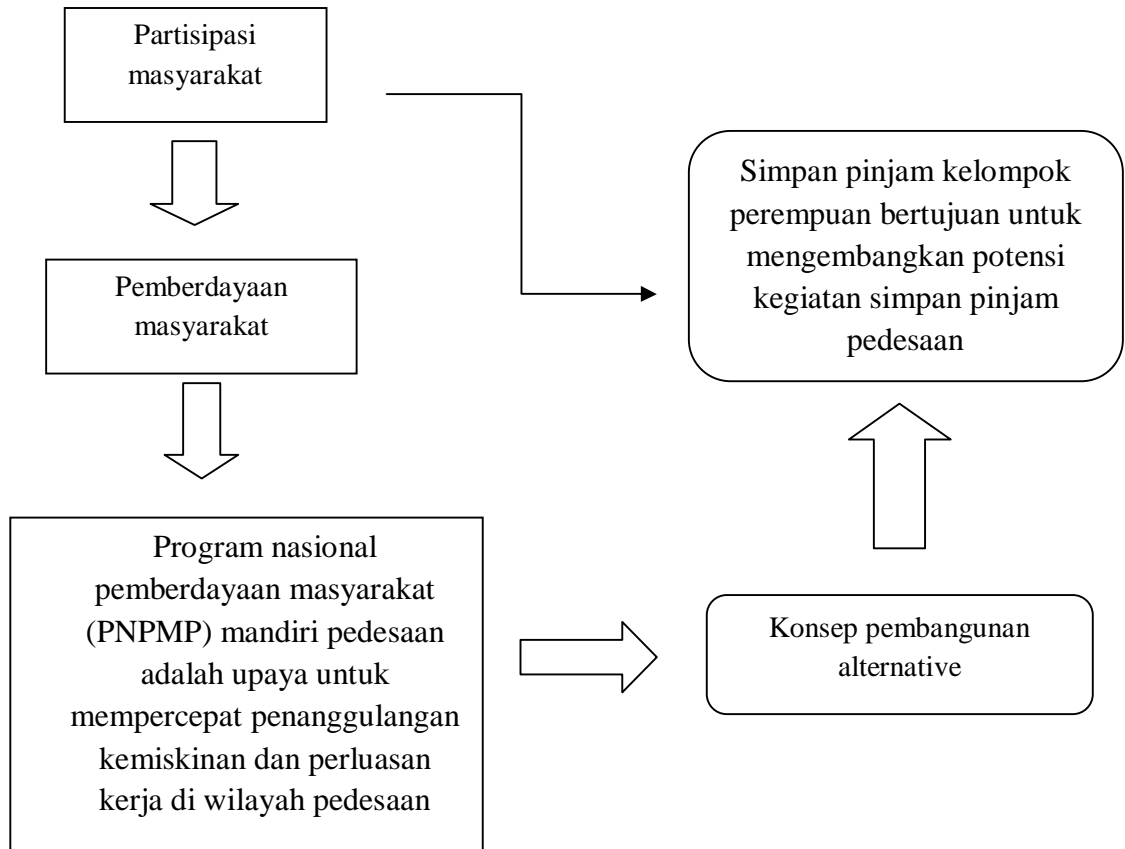
1. Adanya program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Adanya pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat di desa Pelawi Selatan.
3. Adanya masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pengambilan keputusan dalam mengurus simpan pinjam kelompok perempuan.
4. Adanya prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan simpan pinjam kelompok perempuan.

D. Kerangka konsep

konsep yang akan dideskripsikan dan dijelaskan, bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam menjalankan suatu program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan yang ada di desa pelawi selatan kecamatan babalan kabupaten langkat

Gambar 3.1.
Kerangka konsep



E. Teknik Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan di desa pelawi selatan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana dapat diperoleh maka dalam penelitian ini menjadi Narasumber sebagai berikut :

A. Narasumber kepada kepala desa di pelawi selatan :

a) Bapak Muhammad rizal

B. Narasumber penelitian kepada masyarakat di pelawi selatan :

b) Ibu,Dewi Ronasari

c) Ibu, Rosminah

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau keterangan maupun informasi yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. data Primer

Pengamatan (Observasi) yaitu mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian untuk mengamati secara dekat masalah yang dihadapi.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melakukan Tanya jawab secara lisan kepada dua orang atau lebih dalam menggali informasi dengan tatap muka secara langsung untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang berperan dalam masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mempelajari berbagai literature,buku-buku, dokumen-dokumen maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik analisa data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan secara interaktif dan terus-menerus hingga titik jenuh.

Penelitian ini merupakan kajian untuk mengetahui “ bagaimana Partisipasi Masyarakat pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPMP) di Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat (Studi kasus Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) “.

Sedangkan teknik analisa data menurut “ Moleong (2006:239) Adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasinya kedalam suatu pola kategorisasi dari suatu uraian dasar. Dalam penelitian ini teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisa data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang diuraikan secara deskriptif.

H. Gambaran Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.

a. Sejarah singkat pelawi selatan

Desa pelawi selatan adalah desa yang terbentuk sekitar tahun 1990an yang pada waktu itu dibawah naungan kesultanan langkat. Dan setelah indonesia

merdeka dari penjajahan Belanda nama Pelawi masih tetap menjadi nama untuk Desa Pelawi yang di depinitifkan oleh pemerintah Kabupaten Langkat II pada waktu itu.

Desa pelawi membawahi 9(Sembilan) dusun nama pangkalnya juga menggunakan nama pelawi, contohnya Dusun Pelawi Hulu, Dusun Pelawi Dalam, Dusun Pelawi Dalam dan lainnya.

Pada tahun 1992 Desa Pelawi dimekarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat Menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Pelawi Utara dan Desa Pelawi Selatan.

Maka inilah sejarah singkat asal usul Desa Pelawi Selatan terbentuk yang sampai saat ini masih membawahi 4 (empat) dusun,yaitu : Dusun Sukamulia, Dusun Pelawi Selatan dan Dusun Pelawi Sebrang.

b. Letak dan luas wilayah

Desa Pelawi Selatan merupakan salah satu dari 4 desa di wilayah Kecamatan Babalan yang terletak 3 km kearah Barat dari kota Kecamatan dan mempunyai luas wilayah 656 ha.

c. Visi dan misi desa pelawi selatan

Visi

“ Mewujudkan masyarakat desa agar sejahtera melalui sector pertanian dan sumber daya manusia yang maju,kreatif dan berkelanjutan”

Misi

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
2. Mengembangkan agribisnis berbasis kelompok
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat
5. Pengembangan ekonomi masyarakat
6. Meningkatkan sarana dan prasarana

1. Jumlah penduduk

Desa Pelawi Selatan mempunyai penduduk 8471 jiwa yang tersebar didalam 4 dusun yaitu :

Table 3.2

Jumlah penduduk di desa Pelawi Selatan

Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4
2455	2930	2710	375

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pelawi Selatan sebagai berikut :

Table 3.3

Tingkat pendidikan di desa Pelawi Selatan

Tidak tamat SD	SD	SMP	SMA	SARJANA
374	421	1620	2130	215J

3. Mata Pencarian

Desa Pelawi Selatan merupakan Desa yang sebagian besar wilayahnya adalah areal persawahan 440 an hektar, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani dengan antara lain :

Table 3.4

Mata pencarian di desa pelawi selatan

No	Mata pencarian	Jumlah
----	----------------	--------

1	Petani	310 orang
2	Buruh tani	530 orang
3	Buruh tidak tetao/buruh lepas	720 orang
4	Becak motor	160 orang
5	Pedagang kecil	150 orang
6	Karyawan Swasta	30 orang
7	TNI/POLRI/PNS	68 orang
8	Tukang batu/kayu	200 orang
9	Guru swasta	30 orang

Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

a. Pelaku di Pedesaan

Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Pelaku di desa meliputi:

1. Kepala Desa.

Peran Kepala Desa/Lurah adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Yang menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Pelawi Selatan adalah

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD (atau sebutan lainnya) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. Ketua BPD Desa Pelawi Selatan adalah

3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa sosialisasi yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. Keanggotaan TPK di Desa Pelawi Selatan terdiri dari yang menjabat sebagai ketua, sebagai sekretaris, dan Elita sebagai bendahara.

4. Tim Penulis Usulan (TPU)

TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran Tim Penulis Usulan adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDesa dan RKPDes. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat.

5. Tim Pemantau (Tim Monitoring)

Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Di Desa Pelawi Selatan yang menjadi anggota Tim Pemantau adalah ,

6. Tim Pemelihara

Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasilhasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan. Di Desa Pelawi Selatan yang menjadi anggota Tim Pemelihara adalah

7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

KPMD adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Di Desa Pelawi Selatan yang menjadi KPMD yang ikut memfasilitasi dan memandu dalam pelaksanaan kegiatan tahapan PNPM-MP ada lima orang, yakni

8. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pokmas adalah kelompok masyarakat

yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan.

8. Pelaku di Kecamatan

Pelaku di kecamatan adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan berhubungan langsung dengan pelaku di desa. Pelaku-pelaku di kecamatan, meliputi :

a. Camat

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga

bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Yang menjabat sebagai Camat di Kecamatan Babalan adalah

b. Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)

PjOK adalah seorang Kasi Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang memiliki tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan. Yang menjabat sebagai PjOK di Kecamatan Babalan adalah Mariono.

c. Tim Verifikasi (TV)

TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan, atau pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan. Peran TV adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. TV di desa Pelawi Selatan terdiri dari

d. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil

musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. Di Desa Pelawi Selatan adalah menjabat sebagai ketua, menjabat sebagai sekretaris, dan menjabat sebagai bendahara.

e. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)

BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. BP-UPK dibentuk melalui musyawarah antar desa. Yang menjabat sebagai anggota BP-UPK di Desa Pelawi Selatan adalah

f. Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec)

FK dan FT adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti dan melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Peran FK dan FT-Kec adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. FK dan FT-Kec juga berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan. Yang menjabat sebagai FK di Kecamatan Babalan adalah dan menjabat sebagai FT-Kec.

g. Pendamping Lokal (PL)

PL adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu FK atau FT-Kec untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Di setiap kecamatan akan ditempatkan satu orang PL dan Eripto Manurung.

h. Tim Pengamat

Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa serta memberikan masukan

dan saran agar musyawarah dapat berlangsung secara partisipatif. Anggota Tim Pengamat di Kecamatan Babalan adalah

i. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. BKAD berperan sebagai lembaga pengelola pembangunan partisipatif, pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dan sumber daya alam, serta program atau proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa. BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK. Yang menjabat sebagai anggota BKAD di Kecamatan Babalan adalah

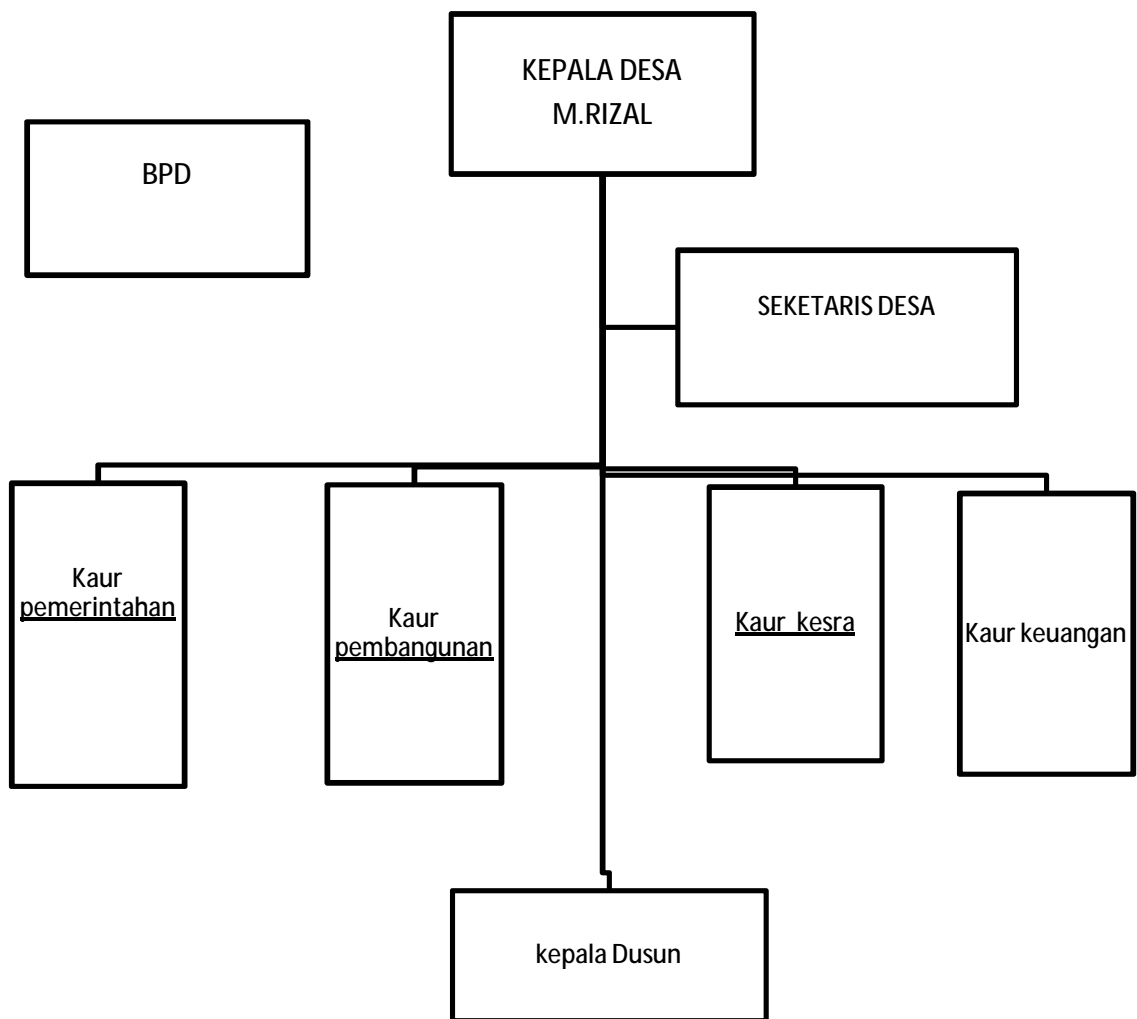
j. Setrawan Kecamatan

Sentrawan Kecamatan diutamakan dari pegawai negeri sipil di lingkungan kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan pemerintah kecamatan dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif. Dalam kaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan, sentrawan melibatkan diri dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan

I. Stuktur desa pelawi selatan kabupaten langkat kecamatan babalan

Table 3.5

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desan Pelawi Selatan
Kecamatan Babalan



TUPOKSI (Tugas pokok dan fungsi)

1. Kepala Desa:

Tugas :

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

- a. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- b. Pembinaan kemasyarakatan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

2. Sekretaris Desa

Tugas

- a. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsure pimpinan secretariat Desa.
- b. Bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi.

Fungsi:

- a. Melaksanakan ketatausahaan
- b. Melaksanakan urusan

3. Kepala urusan (KAUR) pemerintahan

Tugas :

- a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- b. Pelaksanaan administrasi pertanahan. dll.

4. Kepala Urusan (KAUR) pembangunan

Tugas :

- a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan poteksi desa dll.

Fungsi:

- a. Pengelolaan tugas pembantu
 - b. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
5. Kepala urusan (KAUR) kesejahteraan rakyat

Tugas:

- a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan dan social masyarakat.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan untu pelaksanaan program kegiatan keagamaan.
 - b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan.
6. Kepala urusan (KAUR) keuangan

Tugas :

- a. Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan ADM keuangan desa dll.

Fungsi :

- a. Persiapan bahan penyusunan APB desa
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa
7. Kepala Dusun (KADUS)

Tugas :

- a. Membantu kepala desan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dll.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
 - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
8. Badan permusyawaratan desa (BPD)

Tugas :

- a. Membantu panitia pemilihan kepala desa
- b. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa

Fungsi

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Setelah dilakukan penelitian dilapangan, maka diperoleh berbagai data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian yang berlangsung di Desa Pelawi Selatan Kabupaten Langkat Kecamatan Babalan. Pada kesempatan ini penulis berusaha untuk menggulus objek yang diteliti dan menganalisa data-data yang telah diperoleh. Sebelum menganalisa data-data yang telah diperoleh.sebelum menganalisa data tersebut terlebih dahulu mengklasifikasi data tersebut menurut alternative yang dipilih.

1. Deskripsi Data Narasumber

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin Narasumber dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu, Narasumber jenis kelamin Laki-laki dan Narasumber Perempuan. Pada table iv.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategorisasi tersebut.

Table IV.1

Distribusi Narasumber berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	frekuensi	Frekuensi
1	Laki-laki	1	25%
2	Perempuan	2	75%
		3	100

Sumber : data observasi penelitian 2017

Berdasarkan table IV.2 yang tercemin di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas Narasumber bersala dari jenis kelamin Perempuan dengan Frekuensi sebanyak 2 orang atau 75 persen, sedangkan sisanya dari Narasumber Laki-laki dengan frekuensi sebanyak 1 orang dengan presentasi 25 persen.

b. Distribusi Narasumber berdasarkan pekerjaan/jabatan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu kepala desa dan masyarakat. pada table iv.2 ini kita melihat frekuensi untuk masing-masing kategori tersebut menurut pekerjaan yang dimiliki peserta wawancara.

Table IV.2

Distribusi Narasumber berdasarkan pekerjaan/jabatan

no	Jenis pekerjaan	Frekuensi
1	Kepala desa	1
2	Masyarakat	2
	Jumlah	3

Sumber : Data observasi penelitian 2017

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa dalam wawancara kepada narasumber yang memiliki pekerjaan/jabatan sebagai kepala desa 1 orang dan masyarakat 2 orang.

saat ini terdapat 2 kelompok SPP di Desa Pelawi Sealatan yang mendapatkan dana pinjaman dari PNPM Mandiri Perdesaan yaitu:

1. kelompok permata

Table IV.3

nama anggota dan jumlah pinjaman

No	Nama Anggota	Jumlah Pinjaman RP
1	Dewi rona sari (ketua)	7.000.000
2	Arbanah (sekretaris)	6.000.000
3	Pauji astute (bendahara)	6.000.000
4	Sunar liyanti	4.000.000
5	Mar'aini	4.000.000
6	Heni kusriani	4.000.000
7	Yusri ani	4.000.000
8	Yuyuk susunaya	3.000.000
	Total pinjaman	38.000.000

2. kelompok tulip

Table IV.4

nama anggota dan jumlah pinjaman

No	Nama anggota	Jumlah pinjaman RP
1	Rosminah (ketua)	6.000.000
2	Kartinah (sekretaris)	6.000.000
3	Rosmawati (bendahara)	6.000.000
4	Susana	5.500.000
5	Leginah	5.500.000
6	Oningsih	5.500.000
7	Maimunnah	
	Total pinjaman	40.000.000

B. Analisis Data

Deskripsi hasil analisis jawaban Narasumber kepala desa di desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.

Adanya program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pelaksanaan program yang dilakukan pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui dalam meningkatkan program apakah sudah sesuai dengan perencanaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada kepala desa bapak Muhammad Rizal selaku Kepala Desa di Desa Pelawi Selatan di Pelawi Selatan pada hari jumat 24-febuari-2017 tentang pelaksanaan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengatakan “ Bahwa sudah berjalan dengan baik di Desa Pelawi Selatan.tetapi Pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh masyarakat belum berjalan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Pelawi selatan Kecamatan Babalan”.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok permata ibu Dewi rona sari selaku ketua simpan pinjam kelompok perempuan di desa pelawi selatan Kecamatan Babalan pada hari sabtu tanggal 25-febuari-2017 memberi tanggapan “Tentang pertanyaan dalam pelaksanaan program sudah bagus tapi lebih ditingkatkan lanjutkan lagi dan lebih dipercepat nya keluar uang simpan pinjam kelompok perempuan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok tulip ibu rosminah selaku ketua kelompok SPP pada hari senin tanggal 28-febuari-2017 memberi tanggapan yang senada dengan jawaban kelompok permata yaitu

“pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada didesa pelawi selatan.Jadi berdasarkan hasil”.

Bentuk Mekanisme yang dijalankan suatu program apakah sudah mengkatkan kesejahteraan di desa pelawi selatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala desa pelawi selatan Bapak Rizal pada hari jumat 24-febuari-2017 yaitu “ Bentuk mekanisme yang ada didesa pelawi selatan adalah 1. Pelaksanaan program pnpm 2. Pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian.ini salah satu bentuk mekanisme yang ada didesa pelawi selatan”.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok permata ibu Dewi rona sari selaku ketua simpan pinjam kelompok perempuan di desa pelawi selatan Kecamatan Babalan pada hari sabtu 25-febuari-2017 memberi tanggapan tentang “ Bentuk mekanisme yang ada didesa lebih mempermudah mendapatkan pinjaman untuk modal membuka usaha dengan bunga yang rendah dan menurun”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok tulip ibu rosminah selaku ketua kelompok SPP pada hari senin 28-febuari-2017 memberi tanggapan tentang “ suatu bentuk mekanisme yang ada di desa pelawi selatan SPP benar-benar sudah sangat membantu kaum perempuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Dapat dibuktikan dengan jumlah kelompok yang setiap tahun bertambah dan jumlah pinjaman yang juga bertambah tanpa adanya penunggakan pengembalian pinjaman. Disini dapat kita lihat kalau jumlah pinjamannya semakin banyak, berarti ekonominya juga semakin meningkat”.

Kendala yang dilakukan dalam melaksanakan kesejahteraan di desa ini.

Berdasarkan dari jawaban yang diperoleh oleh bapak Muhammad Rizal selaku kepala pada hari Jumat 24-februari-2017 mengatakan “ Kendala yang ada di desa adalah sumber daya manusia tingkat lapisan masyarakat berbeda-beda polanya yang perlu diperbanyak pemberdayaan yang ada di desa pelawi selatan”

Yang dikemukakan oleh kelompok permata ibu Dewi Rona Sari selaku ketua simpan pinjam kelompok perempuan di desa pelawi selatan Kecamatan Babalan pada hari Sabtu 25-februari-2017 mengemukakan “ sejauh ini belum pernah terjadi kendala dalam pinjaman ibu-ibu kelompok SPP di Desa Pelawi Selatan tidak ada yang menunggak. Hal tersebut menunjukkan kalau kegiatan ekonominya masih terus berjalan atau ada juga yang meningkat karena dia masih mampu membayar pinjamannya. Kalau ada anggota yang tidak bisa membayar cicilan pinjamannya, kami menyarankan agar kelompok menutupinya dari uang kas atau tabungan kelompok agar tidak terjadi penunggakan. Atau bisa juga dengan tanggung renteng supaya anggota kelompok bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah kelompok. Tapi kalau permasalahan yang membuat anggota tadi masih ada dan mengganggu keuangan kelompok, maka akan dibentuk tim untuk mendatangi kelompok tadi dan dilakukan pembinaan sampai masalahnya benar-benar teratasi.. “

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok Tulip Ibu Rosminah selaku ketua kelompok SPP pada hari Senin 28-februari-2017 memberi tanggapan tentang “ kendala Selama ini sejauh ini saya di desa jarang ada yang menunggak. Waktu satu tahun saya rasa sudah cukup untuk mengembalikan

pinjaman. Karena pinjaman yang diberikan tidak begitu besar atau semampu peminjam, jadi kalau untung dari berjualan pasti udah bisa buat mengganti pinjaman. Biasanya kalo ada anggota yang menunggak, anggota kelompok akan saling membantu dengan tanggung renteng. Kami mengumpulkan uang untuk menutupi jumlah pinjaman yang tidak mampu dilunasi salah satu anggota jadi tidak ada penunggakan. Peraturan ini tidak memberatkan karena pada awal pembentukan kelompok juga sudah disetujui oleh anggota, jadi tidak ada yang mengeluh. Bahkan membantu karena bisa saja suatu waktu kita yang tidak mampu bayar, tapi jadi bisa tertutupi”.

Adanya Pemberdayaan Yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan dari jawaban yang diperoleh oleh bapak Muhammad rizal selaku kepala desa didesa pelawi selatan kabupaten langkat pada hari jumat 24-febuari-2017 mengatakan “ kepala desa ikut berpartisipasi dan terlibat dalam pemberdayaan masyarakat yang ada didesa Pelawi Selatan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok permata ibu Dewi rona sari selaku ketua simpan pinjam kelompok perempuan pada hari sabtu 25-febuari-2017 mengatakan “ bahwa masyarakat didesa pelawi selatan sudah berpartisipasi dan terlibat dalam pemberdayaan yang ada, baik partisipasi berupa pemikiran maupun fisikan tetapi masih ada masyarakat yang kurang tau tentang pemberdayaan di desa pelawi selatan kabupaten langkat.

Pendapat serupa yang dikemukakan kelompok tulip ibu rosminah selaku ketua kelompok SPP pada pertanggal 28-febuari-2017 mengatakan bahwasanya

masyarakat di desa pelawi selatan kabupaten langkat sudah ikut berpartisipasi baik berupa moral atau pun moril bahkan masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan pemberdayaan di desa pelawi selatan ada juga masyarakat yang tidak mau tahu sama sekali tentang pemberdayaan di desa.

Bentuk pemberdayaan masyarakat di desa Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh bapak Muhammad rizal selaku kepala desa di desa pelawi selatan pada hari jumat 24-februari-2017 mengatakan:“ bentuk pemberdayaan yang ada di masyarakat biasanya ikut pelatihan-pelatihan,ibu-ibu PKK ,usaha-usaha kecil, penyuluhan bagi usaha kecil yang ada di desa”.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok permata ibu Dewi rona sari selaku ketua simpan pinjam kelompok perempuan pada hari sabtu 25-februari-2017 mengatakan “ Bahwa bentuk yang ada di desa pelawi selatan yaitu tentang koperasi hijab dan ibu-ibu pkk dengan kegiatan sosialisasi mengenai simpan pinjam”.

Dikemukakan kelompok tulip ibu rosminah selaku ketua kelompok SPP pada hari senin 28-februari-2017 mengatakan bahwa “ kelompok mereka sering mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam bentuk usaha-usaha kecil yang ada di desa pelawi selatan”.

Partisipasi di desa Pelawi Selatan apakah sudah mengalami keuntungan bagi masyarakat.Berdasarkan dari jawaban yang diperoleh oleh bapak Muhammad rizal selaku kepala desa di desa pelawi selatan pada hari jumat 24-februari-2017 mengatakan “ Sudah pasti ada nya suatu keuntungan bagi masyarakat Sebab

dengan adanya pelatihan pemberdayaan masyarakat kemudian adanya kegiatan PNPM spp paling tidak bisa menambah income masyarakat penambahan modal ekonomi rumah tangga”.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok permata ibu Dewi rona sari selaku ketua simpan pinjam kelompok perempuan pada hari sabtu 25-februari-2017 mengatakan bahwa “ mereka sudah banyak merasakan manfaat dari pemberdayaan masyarakat yang ada di desa pelawi selatan, diantaranya meningkatkan ekonomi yang ada di Desa”.

Dikemukakan kelompok tulip ibu rosminah selaku ketua kelompok SPP pada hari senin 28-februari-2017 mengatakan bahwa “ mereka sangat diuntungkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini, dimana sejak adanya pemberdayaan masyarakat ini perekonomian keluarga mereka lebih meningkat”.

Adanya masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pengambilan keputusan untuk mengurus SPP

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Berdasarkan dari jawaban yang diperoleh oleh bapak Muhammad rizal selaku kepala desa di desa pada hari jumat 24-februari-2017 mengatakan bahwa “ saya ikut aktif dalam partisipasi masyarakat dalam melaksanakan spp dalam mengambil keputusan karna itu sangat menguntungkan bagi masyarakat.karna keputusan itu akhirnya sangat menyangkut kepada mereka sendiri yang membutuhkan spp”.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok permata ibu Dewi rona sari selaku ketua simpan pinjam kelompok perempuan pada hari sabtu 25-februari-2017 mengatakan bahwasanya “ Masyarakat selalu ikut berpartisipasi baik dalam

perencanaan maupun pengambilan keputusan di desa pelawi selatan bahkan masyarakat setempat mendukung sepenuhnya yang namanya perencanaan pengambilan keputusan.

Senada dengan pendapat ibu rosminah selaku ketua kelompok SPP pada hari senin 28-febuari-2017 mengatakan “ saya dan masyarakat di desa pelawi selatan ikut berpartisipasi mulai dari musyawarah sampai pelaksanaan keputusan, masyarakat selalu berpartisipasi akan tetapi masih ada masyarakat yang masih kurang peduli dengan nama nya perencanaan.jadi harapan saya masyarakat harus lebih melibatkan dirinya baik dari musyawarah sampai dengan keputusan”.

Keuntungan masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pengambilan keputusan Berdasarkan dari jawaban yang diperoleh oleh bapak Muhammad rizal selaku kepala desa didesa pelawi selatan pada hari jumat 24-febuari-2017 mengatakan bahwa “ keuntungan dari SPP sangat berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat, dimana dalam SPP ini masyarakat mampu memanfaatkan untuk membantu perekonomian keluarga. Disamping itu, sejauh ini program SPP ini semakin hari sejak didirikannya sampai sekarang semakin berkembang.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok permata ibu Dewi rona sari selaku ketua simpan pinjam kelompok perempuan pada hari sabtu 25-febuari-2017 mengatakan bahwa “ Ibu-ibu di desa pelawi selatan sangat bersyukur dengan program SPP ini, dimana sejak adanya program SPP ini masyarakat yang dulunya tidak memiliki kegiatan sekarang jadi mampu menambah ekonomi keluarga.

Dikemukakan kelompok tulip ibu rosminah selaku ketua kelompok SPP pada hari senin 28-febuari-2017 mengatakan “ Program SPP ini harus lebih

dikembangkan lagi, dimana sejauh ini masyarakat sangat berantusias dan memanfaatkan program ini. Dan masyarakat merasa sangat diuntungkan dengan adanya program ini.”.

Adanya prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan SPP

Prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan SPP. Berdasarkan dari jawaban yang diperoleh oleh bapak Muhammad rizal selaku kepala desa didesa pelawi selatan pada hari jumat tanggal 24-febuari-2017 mengatakan “ Masyarakat melaksanakan kegiatan spp dilaksanakan secara berkelompok yang merupakan tanggung renteng dari setiap kelompok yang sudah diterapkan didesa”.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok permata ibu Dewi rona sari selaku ketua simpan pinjam kelompok perempuan pada hari sabtu 25-febuari-2017 mengatakan “ Didesa.harus mempunyai kelompok.harus mempunyai usaha: -Kelompok beranggotakan seluruhnya perempuan.-Kelompok sudah berumur 1 tahun dan memiliki pengalaman mengelola simpan pinjam minimal 1 tahun dan berpotensi untuk berkembang.-Kelompok telah memiliki kepengurusan yang jelas (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota). -Kelompok telah melaksanakan pertemuan rutin minimal sekali dalam satu bulan. -Kelompok telah memiliki aturan kelompok secara tertulis (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga).- Kelompok beranggotakan minimal 7 orang penerima manfaat dan maksimal 20 orang. -Kelompok tidak memiliki anggota yang tumpang tindih

dengan anggota kelompok lain. -Kelompok tidak beranggotakan hanya keluarga dekat seperti nenek, ibu, putri, menantu, dll”.

Dikemukakan kelompok tulip ibu rosminah selaku ketua kelompok SPP pada hari sabtu 25-febuari-2017 mengatakan “ Masyarakat harus membuat proposal terlebih dahulu sesuai jadwal yang ditentukan setelah di veritifikasi maka selanjutnya BKAD akan mengajukan ke Camat untuk menerbitkan Surat Penetapan pinjaman”.

Bagaimana masyarakat dalam mendapatkan akses bantuan SPP di Desa Pelawi Selatan. Berdasarkan dari jawaban yang diperoleh oleh bapak Muhammad rizal selaku kepala desa didesa pelawi selatan pada hari jumat 24-febuari-2017 mengatakan “ Banyak pertemuan yang harus diikuti, kegiatan kelompok yang harus dijalankan karna ikut harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam PNPM ”.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok permata ibu Dewi rona sari selaku ketua simpan pinjam kelompok perempuan pada hari sabtu 25-febuari-2017 mengatakan “ Harus melengkapi persyaratan untuk mememnuhi prosedur yang telah dilakukan untuk mendapatkan SPP”.

Dikemukakan kelompok tulip ibu rosminah selaku ketua kelompok SPP pada harisenin28febuari-2017mengatakan “ Banyak persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan SPP karena masyarakat harus membuktikan mereka memerlukan khusus”.

Apa kendala masyarakat dalam pelaksanaan prosedur yang harus dilakukan Berdasarkan dari jawaban yang diperoleh oleh bapak Muhammad rizal selaku kepala desa didesa pelawi selatan pada hari jumat 24-febuari-2017 mengatakan “ Masyarakat kurang memahami prosedur yang sudah ditetapkan PNPM seperti harus mempunyai kelompok”.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok permata ibu Dewi rona sari selaku ketua simpan pinjam kelompok perempuan pada hari sabtu 25-febuari 2017 mengatakan “ Masyarakat banyak yang kurang memahami syarat-syarat yang telah ditetapkan PNPM, sehingga masyarakat banyak yang keliruh dalam pengajuan SPP”.

dikemukakan kelompok tulip ibu rosminah selaku ketua kelompok SPP pada hari senin 28-febuari-2017 mengatakan “ Masyarakat yang mengajukan SPP secara mandiri tidak secara kelompok, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pinjaman di karenakan tidak memiliki kelompok”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM) Mandiri Di Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Desa Pelawi Selatan merupakan desa dengan kegiatan SPP yang terus meningkat dan berkembang secara signifikan jika dibandingkan dengan desa lainnya. Desa Pelawi Selatan merupakan desa dengan jumlah kelompok SPP dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Partisipasi ini menunjukkan adanya kemauan masyarakat terutama perempuan di Desa Pelawi Selatan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangganya melalui kegiatan simpan pinjam.
2. Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) adalah Suatu kegiatan yang dilakukan oleh kaum Perempuan dengan aktivitas atau kegiatan pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.
3. Pelaksanaan kegiatan dalam pembentukan kelompok sudah baik sesuai dengan procedure yang telah ditentukan dan masyarakat ikut berpartisipasi baik dalam moril dan material dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh desa.

4. Dalam pengambilan keputusan untuk mengurus SPP masyarakat harus berperan aktif didesa bahkan masyarakat ikut mendukung dalam perencanaan pengambilan keputusan dan masyarakat akan mendapatkan bantuan SPP harus mengikuti procedure yang telah ditetapkan PNPM mandiri.

B. SARAN :

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan. dimana saran sebagai masukan bagi pihak yang terkait yang menjadi objek peneliti yang dilakukan peneliti pada waktu yang akan datang.

1. Diperlukan nya dalam melibatkan masyarakat dalam kegiatan mengenai PNPM Mandiri untuk membekali masyarakat dalam pemberdayaan dirinya. Selain itu perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi-sosialisasi sehingga masyarakat lebih semnggat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM mandiri
2. Melibatkan kesuksesan pelaku PNPM mandiri pedesaan dikecamatan babalan peneliti berharap agar pelaku dapat mempertahankan kinerjanya sehingga kegiatan SPP berjalan dengan baik dan semakin berkembang.
3. Keberhasilan kegiatan SPP di Desa Pelawi Selatan sebaiknya dipublikasikan oleh pelaku PNPM pusat dan pemerintah melalui website resmi sehinggadapat memacu para pelaku PNPM mandiri pedesaan di daerah lain untuk meningkatkan kinerja dan memajukan kegiatan-kegiatan PNPM mandiri terutama kegiatan SPP.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo.2004. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Edisi 2011.
- Buku Petunjuk Teknik Operasional Pengelolaan Dana Bergulir, Edisi 2007.
- Buku Standar Operasional Prosedur Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Edisi 2012.
- Ife, J.,& Tesoriero, F. 2008. Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, Ginanjar.1996. Pemberdayaan Masyarakat: konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat .Jakarta: Bappenas.
- Kaho, Josef. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Daerah Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Karianga, Hendra. 2011. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Perspektif Hukum dan Demokrasi). Bandung : PT. Alumni.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Talizudu. 1987. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Bina Aksara,.

Slamet, Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Sastroputro, Santoso, R.A. 1998. Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Masa. Bandung: Alumni.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Soetomo. 2006. Strategi- Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.

Suyanto, Bagong. 2005. Metode penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT Grasindo.

Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik. Jakarta : Kencana

Internet :

Penelitan, Yoni Yulianti. 2012. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Solok . Solok : Pasca Sarjana Universitas Andalas

http://www.pnpm-mandiri.org/perpustakaan/buku/PNPM_Mandiri_Info_Kit_2012.

<http://www.pnpm-mandiri.org/index> PNPM Mandiri.

<Http://www.duniaesai.com/direktori/esai/37-ekonomi/144-mengapakemiskinan-diindonesia-menjadi-masalah-berkelanjutan.html>

Pedoman wawancara

(kepala desa)

Identitas responden

Nama : Muhammad rizal

Umur :

Jenis kelamin : laki-laki

Agama : islam

Pekerjaan : kepala desa

Adanya program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1. Bagaimana menurut bapak, tentang pelaksanaan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apakah sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : Pelaksanaan program sudah berjalan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Apakah bentuk mekanisme yang dijalankan pada program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa pelawi selatan?

Jawaban : ada 2 bentuk mekanisme yang ada di desa pelawi selatan

3. Apakah ada kendala di dalam melaksanakan kesejahteraan masyarakat di desa ini?

Jawaban : ada yaitu masyarakat nya

Adanya pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat

1. Apakah bapak ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat ?

Jawaban : ya saya ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat

2. Seperti apa bentuk pemberdayaan masyarakat di desa pelawi selatan?

Jawaban : ibu-ibu pkk dan pelatihan pelatihan

3. Apakah keuntungan masyarakat dalam berpartisipasi di desa pelawi selatan

Jawaban : ada , menambah inkam masyarakat

Adanya masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pengambilan keputusan untuk mengurus simpan pinjam kelompok perempuan

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengambilan keputusan?

Jawaban : ikut aktif dalam perencanaan pengambilan keputusan

2. Apa saja keuntungan masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pengambilan keputusan?

Jawaban : untuk membantu perekonomian keluarga salah satu keuntungan masyarakat.

Adanya prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan simpan pinjam kelompok perempuan?

1. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan SPP di desa ini?

Jawaban : prosedur yang dilakukan masyarakat harus secara berkelompok

2. Bagaimana masyarakat dalam mendapatkan akses bantuan SPP di desa ?

Jawaban : harus melakukan banyak pertemuan yang harus dilakukan masyarakat

3. Bagaimana masyarakat dalam pelaksanaan prosedur yang dilakukan ?

Jawaban : masyarakat masih ada yang belum tahu cara melakukan pelaksanaan prosedur

Pedoman wawancara

(kelompok tulip)

Identitas responden

Nama : Dewi Rona Sari

Umur :

Jenis kelamin : perempuan

Agama : islam

Pekerjaan : masyarakat

Adanya program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1. Bagaimana tentang pelaksanaan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apakah sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : sudah bagus

2. Apakah bentuk mekanisme yang dijalankan pada program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa pelawi selatan?

Jawaban : pinjaman modal untuk membuka usaha dirumah

3. Apakah ada kendala di dalam melaksanakan kesejahteraan masyarakat di desa ini?

Jawaban : belum ada nya kendala dalam pinjaman ibu-ibu kelompok SPP

Adanya pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat

1. Apakah ibu berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat ?

Jawaban : kelompok sudah ikut berpartisipasi dalam pemberdaayn masyarakat

2. Seperti apa bentuk pemberdayaan masyarakat di desa pelawi selatan?

Jawaban : koperasi hijab salah satu bentuk pemberdayaan

3. Apakah keuntungan masyarakat dalam berpartisipasi di desa pelawi selatan

Jawaban : dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Adanya masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pengambilan keputusan untuk mengurus simpan pinjam kelompok perempuan

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengambilan keputusan?

Jawaban :masyarakt ikut berpartisipasi

2. Apa keuntungan masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pengambilan keputusan?

Jawaban : memiliki suatu usaha yang bisa membantu perekonomian keluarga.

Adanya prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan simpan pinjam kelompok perempuan?

1. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan SPP di desa ini?

Jawaban : harus membuat proposal yang sudah ditentukan.

2. Bagaimana masyarakat dalam mendapatkan akses bantuan SPP di desa ?

Jawaban : harus melengkapi persyaratan

3. Bagaimana masyarakat dalam pelaksanaan prosedur yang dilakukan ?

Jawaban : ada juga yang belum mengerti dalam melakukan prosedur.

Pedoman wawancara

(kelompok permata)

Identitas responden

Nama : rosminah
Umur :
Jenis kelamin : perempuan
Agama : islam
Pekerjaan : masyarakat

Adanya program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1. Bagaimana menurut ibu tentang pelaksanaan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apakah sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : sudah berjalan dengan baik

2. Apakah bentuk mekanisme yang dijalankan pada program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa pelawi selatan?

Jawaban : sangat membantu para istri dalam meningkatkan taraf hidup keluarga nya.

3. Apakah ada kendala di dalam melaksanakan kesejahteraan masyarakat di desa ini?

Jawaban : sejauh ini belum ada terjadi nya kendala dalam pinjaman SPP

Adanya pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat

1. Apakah ibu berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat ?

Jawaban : ikut berpartisipasi

2. Seperti apa bentuk pemberdayaan masyarakat di desa pelawi selatan?

Jawaban : usaha-usaha kecil

3. Apakah keuntungan masyarakat dalam berpartisipasi di desa pelawi selatan

Jawaban : sangat diuntungkan

Adanya masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pengambilan keputusan untuk mengurus simpan pinjam kelompok perempuan

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengambilan keputusan?

Jawaban : ikut berpartisipasi mulai dari musyawarah sampai pelaksanaan keputusan.

2. Apa saja keuntungan masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pengambilan keputusan?

Jawaban : sangat diuntungkan

Adanya prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan simpan pinjam kelompok perempuan?

1. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan SPP di desa ini?

Jawaban : membuat proposal yang sudah ditentukan.

2. Bagaimana masyarakat dalam mendapatkan akses bantuan SPP di desa ?

Jawaban : banyak persyaratan yang harus dilakukan kepada kelompok.

3. Bagaimana masyarakat dalam pelaksanaan prosedur yang dilakukan ?

Jawaban : ada juga sebagian yang kurang paham dalam melakukan prosedur.